



IDN/ANTARA

PENGUKUHAN MAJELIS RENDAH PARLEMEN JERMAN

Pejabat Kanselir Jerman Angela Merkel meninggalkan sesi pengukuhan majelis rendah Parlemen Jerman Bundestag di Berlin, Jerman, Selasa (26/10).

Kelaparan, Ibu di Afghanistan Jual Anaknya Rp7 Juta

Sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021, Afghanistan telah menghadapi krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

KABUL (IM) - Afghanistan yang kini dikuasai Taliban berada di ambang bencana besar, dengan keluarga-keluarga miskin yang sudah putus asa terpaksa menjual anak dan bayi mereka kepada orang lain. Salah satu keluarga di luar Herat mengakui terpaksa menjual bayi perempuannya seharga US\$ 500 (Rp 7 juta). Seperti dilaporkan BBC dan dilansir Mirror.co.uk, Rabu

(27/10), Program Pangan Dunia (WFP) pada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan bahwa nyaris 1 juta anak di Afghanistan berisiko kelaparan. Diungkapkan WFP bahwa jutaan orang bisa meninggal kecuali tindakan segera diambil untuk menyelamatkan 22,8 juta warga Afghanistan yang hampir mati kelaparan. Afghanistan menghadapi

blokade global untuk bantuan kemanusiaan sejak pasukan asing ditarik keluar dari negara itu. Berkuasnya kembali Taliban berujung pada tidak adanya pengakuan internasional dan tidak adanya lagi bantuan yang masuk ke Afghanistan. Di luar kota Herat, sepasang suami istri yang berduka menuturkan bagaimana mereka terpaksa menjual bayi perempuan mereka kepada seorang pria yang tinggal tidak jauh dari mereka. Bayi perempuan pasangan ini dijual seharga US\$ 500 atau setara Rp 7 juta. Pria yang membeli bayi pasangan itu mengklaim akan menikahkan bayi itu nantinya dengan anak laki-lakinya ketika

keduanya sudah dewasa, namun orangtua bayi perempuan itu menyadari bahwa putri mereka akan menghadapi masa depan yang jauh lebih buruk dari itu. "Anak-anak saya lainnya sekarat karena kelaparan jadi kami harus menjual anak perempuan saya," tutur ibunya sang bayi yang tidak disebut namanya, sambil menangis kepada seorang reporter BBC yang menemuinya. "Bagaimana bisa saya tidak sedih? Dia anak saya dan saya berharap saya tidak harus menjual putri saya," ujarnya. "Putri saya tidak tahu seperti apa masa depannya nanti. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu, tapi saya

harus melakukannya," ucapnya. Disebutkan bahwa pria yang berniat membeli bayi pasangan ini telah membayar setengah dari harga total untuk bayi perempuan itu. Sisanya baru akan dilunasi setelah bayi itu diserahkan kepadanya beberapa bulan ke depan. BBC dalam laporannya menyebut praktik perdagangan bayi ini telah dilaporkan ke tim perlindungan anak pada Badan Anak-anak PBB atau UNICEF. "Afghanistan sekarang berada di antara krisis kemanusiaan terburuk di dunia, mungkin yang terburuk. Kami menghitung mundur menuju bencana," ucap Direktur Eksekutif WFP PBB, David Beasley. ● tom

AS Pertimbangkan Bebas Visa untuk Empat Negara

WASHINGTON (IM) - Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) Alejandro Mayorkas mengatakan AS sedang mempertimbangkan untuk menambatkan empat negara ke dalam program bebas visanya. Program bebas visa itu memungkinkan warga asing datang ke AS tanpa visa untuk masa tinggal hingga 90 hari. "Kami memiliki empat kandidat dalam proses: Israel, Siprus, Bulgaria, dan Rumania," kata Mayorkas dalam sebuah acara industri perjalanan pada Rabu (27/10). "Kami sangat, sangat fokus pada program ini," ujar Mayorkas. Dia juga menyebutkan program itu memberikan manfaat ekonomi dan keamanan yang signifikan. Pada September, AS menambahkan Kroasia ke dalam program bebas visanya. Kepala Eksekutif Asosiasi Perjalanan AS Roger Dow mengatakan penambahan Kroasia dalam daftar bebas visa AS itu berkontribusi pada peningkatan devisa senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp 1,42 triliun) bagi ekonomi Negeri Paman Sam itu. "Setiap kali Anda menambahkan salah satu negara (ke dalam daftar bebas visa) ini, perjalanannya akan meningkat pesat," kata Dow. Pihak Gedung Putih pada Agustus mengatakan bahwa Biden menekankan pemerintahannya akan memperkuat kerja sama bilateral dengan Israel dengan cara yang akan

menguntungkan warga AS dan warga Israel. Termasuk dengan bekerja sama untuk memajukan Israel dalam program bebas visa AS. Pernyataan tersebut disampaikan Gedung Putih setelah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Mayorkas juga telah bertemu dengan Duta Besar Israel untuk AS pada Agustus dan keduanya membahas isu bebas visa. Pada Februari, Mayorkas berbicara dengan Komisaris Komisi Eropa untuk Urusan Dalam Negeri. Keduanya menyatakan minat yang berkelanjutan dalam mempertahankan Perjanjian Catatan Nama Penumpang AS-EU dan bekerja sama dengan Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania untuk memenuhi kualifikasi untuk Program Bebas Visa. Untuk mengikuti program tersebut, setiap negara harus memenuhi persyaratan terkait kontraterorisisme, penegakan hukum, penegakan migrasi, keamanan dokumen, dan pengelolaan perbatasan. Saat ini ada 40 negara yang termasuk dalam program bebas visa AS. "Persyaratan ini termasuk memiliki tingkat penolakan visa non-imigran di bawah tiga persen, mengeluarkan dokumen perjalanan yang aman, dan bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas kontraterorisisme AS," kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada September. ● gul

Suu Kyi Bantah Tuduhan Junta Militer Soal Penghasutan

YANGON (IM) - Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi membantah tuduhan penghasutan yang dituduhkan kepadanya. Ini merupakan kesaksian pertama Suu Kyi di depan pengadilan sejak ditangkap pada Februari lalu dalam kudeta militer. Pada Selasa (26/10), Suu Kyi membantah tuduhan penghasutan yang berkaitan dengan dua pernyataan yang diterbitkan partainya pada bulan Februari. Kantor berita Myanmar Now melaporkan, penghasutan dimaksudkan untuk menggerakkan rezim militer dan meminta organisasi internasional untuk tidak bekerja dengan mereka. "Aung San Suu Kyi mampu mempertahankan ketidakbersalahannya dengan sangat

baik," ujar seorang anggota tim pembelaannya yang berbicara dengan syarat anonim, dilansir Aljazeera, Rabu (27/10). Pengacara Suu Kyi menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut, karena militer telah melarang tim hukumnya berbicara kepada media tentang persidangannya. Para jenderal menahan Suu Kyi dan anggota senior pemerintah sipil pada Februari lalu. Suu Kyi ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Dia menghadiri sidang pada Selasa, di pengadilan yang dibangun khusus di Naypyidaw. Suu Kyi menghadapi 10 dakwaan lain, termasuk memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar aturan virus korona, dan melanggar Undang-Undang Ra-

hasia Resmi. Media pemerintah Myanmar belum melaporkan perkembangan kasus Suu Kyi. Satu-satunya sumber informasi publik tentang persidangan Suu Kyi adalah pengacaranya, Khin Maung Zaw, yang menerima perintah untuk bungkam oleh otoritas militer. Perintah untuk bungkam tersebut datang setelah Khin Maung Zaw melaporkan, Presiden Myanmar yang digulingkan, Win Myint bersaksi di pengadilan bahwa militer memaksanya untuk melepaskan kekuasaan. Pemaksaan itu terjadi beberapa jam sebelum kudeta. Militer memperingatkan Win Myint bahwa dia dapat akan mendapatkan kerugian secara serius jika dia menolak untuk memberikan kekuasaan. ● ans

Senat Setuju Dakwa Presiden Bolsonaro Terkait Pandemi

BRASILIA (IM) - Komite investigasi Senat Brasil menyetujui sebuah laporan yang menyerukan agar Presiden Jair Bolsonaro didakwa atas sembilan kejahatan, Rabu (27/10). Dakwaan tersebut terkait penanganan terhadap pandemi virus Corona, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. "Kekacauan pemerintahan Jair Bolsonaro akan memasuki sejarah sebagai tingkat kemelatan manusia yang paling rendah," kata Senator dan pelapor laporan, Renan Calheiros. Calheiros menyatakan presiden berpihak pada para diktator, termasuk Adolf Hitler dan Augusto Pinochet. Butuh waktu sekitar enam

bulan bagi komite yang dikuasai oposisi ini menyiapkan laporan setebal 1.300 halaman itu. Laporan juga menuduh bahwa 77 orang tambahan dan dua perusahaan melakukan kejahatan. Di antara orang-orang yang ditambahkan adalah gubernur negara bagian pedalaman Amazonas, Wilson Lima. Lima didakwa karena kasus kekurangan pasokan oksigen di rumah sakit sehingga mengakibatkan kematian karena asfiksia awal tahun ini. Pemerintahannya saat ini sedang dalam penyelidikan federal atas dugaan korupsi terkait dengan pembelian peralatan medis. Lima menolak pencantuman namanya sebagai sikap politik. "Menempatkan

nama saya di laporan akhir memiliki motivasi yang sepenuhnya politis dan elektoral. saya bahkan tidak diselidiki oleh komite," kata Lima dalam sebuah pernyataan yang diberikan oleh kantor persnya. Sebuah rancangan laporan yang dirilis minggu lalu telah menyerukan agar Bolsonaro didakwa atas genosida dan pembunuhan. Namun, para senator kemudian memutuskan untuk membatalkan tuduhan khusus itu. Anggota parlemen mempertimbangkan sebagai alasan teknis sebagai alasan pembatalan dakwaan tersebut. Mereka memutuskan untuk menambahkan 10 orang ke dalam daftar individu yang harus didakwa. ● tom

Polisi Gerebek Perdagangan Narkoba, 150 Orang Ditangkap dan Sita Uang Tunai Rp439 Miliar

WASHINGTON (IM) - Penegak hukum di AS dan Eropa menangkap setidaknya 150 orang yang diduga melakukan perdagangan narkoba melalui jaringan gelap. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan selama sepuluh bulan. Petugas juga menyita uang tunai lebih dari USD31 juta (Rp439 miliar) dan mata uang kripto serta 45 senjata api (senpi). Departemen Kehakiman mengatakan mereka yang ditangkap terlibat dalam puluhan ribu penjualan narkoba online ilegal di Amerika, Inggris, Australia, Bulgaria, Prancis, Jer-

man, Italia, Belanda, dan Swiss. Media Belanda melaporkan 65 orang Amerika termasuk di antara mereka yang ditangkap, bersama 47 orang Jerman dan 25 orang. "Ini operasi hari ini adalah membuat penjahat yang beroperasi di dark web menjadi waspada bahwa komunitas penegak hukum memiliki sarana dan mitra global untuk membuka kedok mereka dan meminta pertanggungjawaban atas aktivitas ilegal mereka, bahkan di situs dark web," ujar Jean-Philippe Lecouffe, Wakil Direktur Eksekutif Operasi Europol, dalam pernyataan. ● tom



IDN/ANTARA

UNJUK RASA PETUGAS KESEHATAN SWISS

Petugas kesehatan dari University Hospital Zurich berbaring di tanah untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik selama protes di Zurich, Swiss, Selasa (26/10).

Militer Sudan Bebaskan PM Abdalla Hamdok

KHARTOUM (IM) - Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dilaporkan telah kembali ke rumah sehari setelah militer yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan mengudeta pemerintahan dan menahannya, Selasa (26/10) waktu setempat. Pembebasan Hamdok dan istrinya menyusul kecaman internasional atas perebutan kekuasaan oleh Al-Burhan. Seperti dilansir laman Aljazeera, Rabu (27/10), pernyataan oleh kantor Hamdok mengatakan, bahwa perdana menteri yang digulingkan dan istrinya berada di bawah pengamanan ketat di rumah mereka di ibu kota Sudan, Khartoum. Sementara pejabat sipil lainnya yang ditangkap pada hari kudeta masih tetap ditahan. Namun lokasi mereka tidak diketahui. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menuntut pembebasan Hamdok dengan segera. Kekuatan dunia juga diminta untuk bersatu untuk menghadapi apa yang Sekjen sebut "epidemi kudeta". Kudeta Sudan terjadi setelah beberapa bulan menyusul meningkatnya ketegangan antara para pemimpin militer dan sipil dalam masa transisi Sudan menuju demokrasi. Al-Burhan semestinya menyerahkan kepemimpinan

Dewan Berdaulat yang menjalankan negara kepada seorang sipil pada bulan depan. Namun demikian, kudeta ini mengancam untuk menggagalkan proses transisi mulus di Sudan. Masa transisi ini dimulai sejak penggulingan pemimpin Omar al-Bashir dalam pemberontakan dua tahun lalu. Pada Selasa, ribuan demonstran pro-demokrasi kembali ke jalan-jalan dan memblokir jalan-jalan di ibu kota dengan barikade darurat dan membakar ban. Pasukan telah menembaki massa sehari sebelumnya yang menewaskan empat pengunjung rasa. Sebelumnya, al-Burhan muncul di publik untuk kedua kalinya sejak kudeta. Dia mengatakan militer terpaksa turun tangan untuk menghindari perang saudara. Jenderal mengatakan Hamdok telah ditahan untuk keselamatannya, di rumahnya sendiri, dan akan dibebaskan. Namun dari banyak pejabat senior pemerintah lainnya yang ditahan pada Senin (25/10), al-Burhan menuduh bahwa beberapa orang mencoba menghasut pemberontakan di dalam angkatan bersenjata. Mereka akan diadili, katanya. "Orang lain yang ditemukan tidak bersalah akan dibebaskan," ujarnya menambahkan. ● gul

Sekjen PBB Sebut Kudeta Seperti Pandemi

NEW YORK (IM) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengancam kudeta yang baru terjadi di Sudan, Senin (25/10). Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak bersama untuk mencegah "epidemi kudeta ini." Pengambilalihan oleh militer di Sudan telah didahului oleh kudeta di Myanmar, Mali, Guinea, dan upaya kudeta di beberapa negara lain. Guterres mengatakan, bahwa kesenjangan geopolitik yang kuat di antara anggota Dewan Keamanan, dan dampak ekonomi dan sosial dari Covid-19 telah menciptakan kudeta. "Di mana beberapa pemimpin militer merasa bahwa mereka memiliki impunitas total, mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan karena tidak akan terjadi apa-apa pada mereka," ujar Guterres seperti dikutip laman Aljazeera, Rabu (27/10).

Sudan," kata para diplomat. Sebelum pertemuan, wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan, dewan harus mengimbau untuk menghentikan kekerasan dari semua pihak. "Saya tidak berpikir itu tugas kita untuk memberi label situasi seperti kudeta atau bukan kudeta," katanya. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara dengan Hamdok setelah pembebasannya dari tahanan. Dia juga meminta militer Sudan untuk membebaskan semua pemimpin sipil yang ditahan dan menekankan bahwa AS mendukung transisi yang dipimpin sipil menuju demokrasi di Sudan. Pada April 2019, militer Sudan mengudeta pemerintah mantan perdana menteri Omar al-Bashir. Dia dilengserkan setelah memerintah selama 30 tahun. Rakyat Sudan bersuka cita menyambut jatuhnya Al-Bashir. Saat ini dia mendekam di penjara di Khartoum. Rakyat kemudian menuntut agar pemerintahan transisi dibersihkan dari unsur-unsur Al-Bashir. Setelah itu, Sudan dijalankan oleh pemerintahan transisi gabungan sipil dan militer. Pemerintahan tersebut diatur untuk berkuasa selama tiga tahun. Setelah masa transisi berakhir, Sudan akan menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru. ● ans



IDN/ANTARA

SERIAL NETFLIX SQUID GAME

Seorang anak perempuan memakai kostum mirip serial Netflix "Squid Game" berpose untuk foto di depan boneka raksasa bernama "Younghee" dari serial tersebut yang dipamerkan di sebuah taman di Seoul, Korea Selatan, Selasa (26/10).

AS Bekukan Bantuan Ekonomi Rp9,9 Triliun ke Sudan

KHARTOUM (IM) - Amerika Serikat (AS) mengambalik tindakan terhadap militer Sudan yang melakukan kudeta. AS membekukan bantuan ekonomi sebesar Rp9,9 triliun dan menyerukan agar perdana menteri Sudan dan pejabat pemerintah lainnya segera dibebaskan, beberapa jam setelah kudeta. "Kedutaan Besar AS mengutuk pemindahan paksa pemerintah sipil oleh militer Sudan pada Senin 25 Oktober 2021 di tengah situasi genting di negara tersebut. Al-Burhan mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah serta menanggukkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan. Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di ibu kota Khartoum. Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat sipil dan sipil, yang mengawasi masa transisi sampai pemilu yang akan digelar pada 2023, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan. ● gul

di rumahnya, agar tetap aman usai mendapat ancaman pembunuhan. Kami merasa ada ancaman terhadap nyawa perdana menteri, itulah mengapa kami menjauhkannya," kata al-Burhan. "Dia (Hamdok) ada di rumah saya dan wartawan bebas untuk menemuinya," seperti dikutip dari Anadolu. Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil ditangkap oleh militer Sudan pada Senin 25 Oktober 2021 di tengah situasi genting di negara tersebut. Al-Burhan mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah serta menanggukkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan. Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di ibu kota Khartoum. Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat sipil dan sipil, yang mengawasi masa transisi sampai pemilu yang akan digelar pada 2023, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan. ● gul